
PENERAPAN NILAI-NILAI ADAT MELAYU JAMBI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

Nopriyandri¹ dan Saidina Usman²

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi

Email: nopriyandri22@gmail.com; usman.elqureishi@gmail.com

ABSTRAK

Pendahuluan: penelitian ini dilakukan untuk melihat penerapan nilai-nilai adat di lingkungan pemerintah kota Jambi, penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya peran lembaga adat di provinsi Jambi dalam mengambil peran didalam lingkungan pemerintah provinsi Jambi dalam mewujudkan pembangunan di provinsi Jambi. Pertanyaan penelitiannya adalah apakah di lingkungan pemerintah kota Jambi sudah diterapkan nilai-nilai adat melayu Jambi yang sangat kental dengan nilai gotong royong, nilai musyawarah dan lain-lain. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi keterpercayaan hasil penelitian diperoleh dengan teknik perpanjangan keikutsertaan, ketelitian pengamatan, triangulasi data. Hasil: penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai adat melayu Jambi dalam mewujudkan good governance di lingkungan pemerintah kota Jambi sudah dilakukan dengan baik, ini dibuktikan dengan program bangkit berdaya dimana program tersebut mengandung nilai-nilai gotong royong melalui cara pemerintah memberikan fasilitas material untuk membangun lingkungan tetapi masyarakatlah yang bersama-sama mengerjakan dan menyelesaikan pembangunan di lingkungan tersebut misalnya pembangunan jalan di lorong-lorong, pembangunan jembatan kecil dll, nilai adat yang lain yang terdapat didalam program pemerintahan kota Jambi adalah nilai kemandirian dimana masyarakat tidak berpangku tangan menunggu hasil pembangunan dari pemerintah tetapi mau meluangkan waktu untuk sama-sama membangun desa dan lingkungan mereka.

Kata Kunci : Nilai-Nilai Adat, Good Governance

PENDAHULUAN

Proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis otonomi merupakan bentuk kesadaran pemerintah dan warga masyarakat daerah untuk menjalankan dan mengurus daerahnya sendiri berdasarkan wewenang yang telah diserahkan pemerintah pusat. hal ini dapat terjadi karena dua alasan, yaitu pertama, konstitusi telah memerintahkan pembentukan daerah yang berasaskan otonomi sebagai bentuk bersifat kompromi final; dan kedua, rentang kendali pemerintahan negara yang sangat terbatas, sehingga dibutuhkan pemerintah daerah agar pelayanan publik dapat dilayani secara optimal. Dalam penyeleenggaraan pemerintahan daerah, ada banyak pertimbangan yang harus dijadikan pegangan pokok agar konsep pelaksanaan otonomi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Di antara berbagai pertimbangan tersebut adalah penerapan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (the good local governance) yang merupakan salah satu prinsip yang perlu menjadi

perhatian. Konsep governance diartikan sebagai proses dari proses pengambilan keputusan dimana keputusan diimplementasikan ataupun tidak diimplementasikan. Fokus dari analisis governance adalah aktor yang terlibat dalam pembuatan keputusan dan implementasinya baik dari struktur formal maupun informal. Adapun akses dan indikator dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik tersebut adalah kuatnya fungsi aparatur birokrasi pemerintah daerah yang berpihak dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat daerah. Prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik dalam mengatasi persoalan daerah adalah diletakkan pada dua hal, yaitu pertama, keseimbangan internal, yang mengatur hubungan antara organ-organ pemerintahan daerah dan masyarakat, khususnya yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah. Kedua, keseimbangan eksternal, yang menekankan pemerintah daerah sebagai entitas sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, yang hendaknya memperhatikan hubungan antara pemerintah daerah dengan seluruh stakeholder daerah sebagai perwujudan dari pemenuhan tanggung jawab pemerintah daerah. Menurut Milton J Esman variabel-variabel lembaga yang dapat membantu Pemerintah daerah melaksanakan perubahan terdiri dari variabel kepemimpinan, doktrin, program, sumberdaya dan struktur intern, Variabel transaksi dan Variabel lingkungan Luar (ekstern).

Kepemimpinan merupakan variabel yang penting dalam pembangunan daerah. Kepemimpinan adalah kelompok orang yang aktif terlibat dalam merumuskan doktrin dan program kerja serta menetapkan dan membina hubungan-hubungan dengan lingkungannya.

Doktrin merupakan nilai-nilai atau tujuan atau metode-metode operasional yang mendasari tindakan sosial, yang menggambarkan citra dan harapan-harapan yang dituju. Menurut Esman, doktrin adalah pemaparan nilai-nilai dan sasaran dan metode-metode operasional yang mendasari kegiatan masyarakat.

Nilai (value) merupakan konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Oleh karena itulah nilai merupakan unsur pokok dan fundamental dalam masyarakat serta menjadi tonggak bangunan struktur sosial. Doktrin yang mendasari tindakan operasional pembangunan lembaga serta mewakili nilai-nilai pelayanan publik dengan prinsip-prinsip partisipasi, efisiensi dan efektifitas, keadilan, akuntabilitas dan transparansi. Dengan demikian, kearifan-kearifan lokal berupa adat budaya yang memiliki nilai-nilai Berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik yang pada dasarnya berorientasi pada masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan perbaikan sistem manajemen pemerintahan dengan mengedepankan prinsip-prinsip strategic vision, equity, effectiveness dan efficiency, profesionalism, accountability, participation, responsiveness, supervision, transparency, low enforcement.

Sebagai salah satu daerah yang kaya dengan khazanah kearifan lokal, kota Jambi bahkan dengan tegas meletakkan semboyan “ Tanah Pilih Pusako Bertuah” dalam lambang daerah; yang bermaksud kota Jambi dalam penyelenggaraan pemerintahannya tetap mengacu dan berpedoman pada nilai-nilai adat budaya, yang telah dipegang dari waktu ke waktu, tidak lekang oleh panas, dan tidak lapuk oleh hujan.

Nilai-nilai adat Melayu yang telah mengakar di tengah masyarakat kota Jambi itu, semestinya dapat diterima dan diamalkan dalam berbagai bidang, termasuk dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selaras dengan pendapat gubernur Jambi yang mengatakan “Kita tidak bisa tinggalkan adat istiadat yang ada di Jambi ini. Kita hormati norma- norma adat, terutama bagi generasi muda kita. Negeri ini tidak bisa berdiri sendiri dan melangkah sampai sejauh ini tanpa memperhatikan dan memegang teguh adat istiadat yang luhur khususnya di tanah Jambi ini. Oleh sebab itu, penting bagi generasi muda untuk mengetahui adat dan budaya daerah, untuk dipelajari,” Upaya-upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik harus terus digalakkan dan dimaksimalkan. Tidak hanya mengandalkan prinsip-prinsip yang datang dari luar atau produk pemikiran Barat, tapi juga memberikan perhatian pada pelestarian dan pengamalan nilai budaya lokal yang sudah sedia ada.

Berpegang dengan nilai-nilai kearifan lokal seperti nilai-nilai yang terkandung dalam adat Melayu Jambi, bukan bermakna harus melepaskan atau membuang nilai-nilai yang berasal dari luar dalam mengelola pemerintahan daerah, namun bisa saling menguatkan sehingga tata kelola pemerintahan kota Jambi betul-betul baik.

Bila diperhatikan, dalam pusaran arus globalisasi seperti saat ini, nilai-nilai lokal semakin terpinggirkan. Adat resam yang selama ini secara turun temurun itu seakan dianggap usang dan tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Hal itu dapat dilihat pada tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat kota Jambi; baik dari kalangan pemerintahan hingga masyarakat luas, semakin berkurang. Para penyelenggara pemerintahan daerah lebih sibuk dengan upaya pembangunan fisik daerah; sebagai konsekuensi dari arus kemajuan zaman, dibandingkan dengan upaya pembangunan kualitas pelayanan, yang dimulai dari membangun kualitas sumber daya manusia yang berbasis pada penanaman nilai-nilai yang tumbuh ditengah masyarakat itu sendiri.

Parahnya lagi, disatu sisi gemanya prinsip-prinsip Good Governance terus di suarakan agar aparaturnya pemerintahan dapat mengamalkan, namun tidak terlaksana dan tidak mampu diamalkan dengan baik. Sedangkan disisi lain, nilai-nilai kearifan lokal daerah Jambi, juga tidak sepenuhnya menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di tataran praksis, pungutan liar (pungli) masih terjadi, tidak disiplin, korupsi, kolusi dan nepotisme masih terus dilakukan, begitu juga dengan permasalahan pelayanan lainnya. Padahal adat dalam konteks Melayu Jambi adalah adat yang nilainya bersumber dari nilai agama, yakni agama Islam. Semboyan “Adat bersendi Syara’, dan Syara’ bersendi Kitabullah” adalah penegasan bahwa berpegang dengan nilai-nilai adat Melayu, sama dengan berpegang dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh agama Islam.

Berdasarkan pada masalah yang ada diatas, penelitian ini menemukan momentumnya, guna mengetahui dan menganalisis nilai-nilai yang terdapat dalam adat Melayu Jambi, kemudian mengkomparasikan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Good Governance, untuk mengukur bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah kota Jambi, dalam beberapa tahun terakhir.

Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi kegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Di bumi Tanah Pilih Pusako Betuah Kota Jambi, yang memiliki rambu - rambu

“Adat Bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah”, dibentuk atau memiliki keorganisasian yang bernama Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi. Lembaga ini bertugas membina adat istiadat, seperti tertuang dalam konsederannya sebagai berikut:

1. Bahwa adat istiadat kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat memegang peranan penting dalam pergaulan dan dapat/mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang kegiatan.
2. Bahwa adat istiadat kebiasaan masyarakat dan lembaga yang hidup bersendikan syarak dan syarak bersendikan kitabullah, perlu dibina dan dikembangkan sehingga secara nyata dapat didayagunakan untuk kelancaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan Nasional.
3. Bahwa pembinaan adat istiadat kebiasaan masyarakat dan lembaga adat di Desa/Kelurahan tidak terlepas dari wilayah adat yang sudah ditentukan di Kota Jambi yang disebut Marga, Mendapo dan Kampung.

Dalam paparan lebih lanjut mengenai Lembaga Adat Kota Jambi ini, maka diperlukan fungsi yang dapat menjaga dan menerapkan nilai-nilai “Adat Bersendi Syarak, Syarakbersendi Kitabullah” tersebut dalam membina adat dan budaya melayu di Kota Jambi. Adapun fungsi Lembaga Adat tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pembangunan di segala bidang, terutama di bidang kemasyarakatan dan sosial budaya.
2. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat di tiap-tiap tingkat lembaga adat, guna kepentingan hubungan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan dan perkara adat.
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat di daerah Jambi, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah Jambi pada khususnya.
4. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-undang Jambi, yang merupakan kumpulan aturan yang digunakan oleh pihak kesultanan Jambi untuk mengatur roda pemerintahan, Undang-undang tersebut terbagi kepada dua bagian utama, yakni hukum adat dan hukum syarak. Yang menandakan bahwa betapa adat dan syarak sangat dijunjung tinggi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam pembahasannya, hukum syarak lebih menekankan bagaimana kedudukan hukum adat apabila berhadapan dengan hukum syarak. Yakni bagaimana posisi hukum syarak dijadikan landasan atau rujukan utama bagi penerapan hukum adat, sehingga syarak disebut sebagai dasar pucuk undang yang delapan.

Dalam naskah Undang-undang Jambi disebutkan secara tegas bahwa semua umat Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa hukum yang berlaku ada dua: hukum syarak yang sudah lazim (pasti) dan hukum adat yang kuat. Hukum syarak ditetapkan oleh kesepakatan para ulama, sedangkan hukum adat ditetapkan berdasarkan kesepakatan para penghulu dalam suatu negeri. Kesepakatan tentang hukum adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum syarak, hukum adat bisa berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum syarak.

Lebih jauh mengenai perbedaan hukum adat dengan hukum syarak dan menggambarkan spirit hukum syarak dalam hukum adat dapat dilihat dalam lembaran Undang-undang Jambi.

“Adapun martabat yang tiada sunyi kepada umat Muhammad itu yaitu dua martabat, yaitu pertama hukum syarak yang pasti dan yang kedua adat yang kuat. Karena bahwasanya syarak itu meruapakan kesepakatan dengan segala ulama dan karena bahwasanya adat itu kesepakatannya penghulu dalam negeri. Maka apabila manusia berbeda pendapat, maka kembalilah kepada hukum adat dalam negeri itu, berbeda negeri berbeda pula adatnya. Tiap-tiap negeri berdiri dengan adat seperti firman Allah SWT: Apabila kamu menghukumkan antara manusia itu maka hendaklah kamu menghukum dengan hukum yang adil (hingga akhir ayat). Dan adapun adat Islam itu bersesuaian dengan hukum syarak.”

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian yang dilakukan berjudul “ penerapan nilai-nilai adat melayu jambi di lingkungan pemerintah kota jambi” Dalam penelitian ini ada beberapa teori yang menjelaskan bahwa pentingnya implementasi nilai-nilai adat melayu jambi di pemerintah kota jambi. Peraturan Daerah Provinsi Jambi (Perda Jambi) Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Lembaga Adat Melayu Jambi menyatakan bahwa adat istiadat dan Lembaga Adat Melayu Jambi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adalah adat yang bersendikan syar' dan syara' bersendikan Kitabullah perlu dibina dan dikembangkan secara nyata dan dinamis sehingga dapat didayagunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan nasional. Lembaga Adat Melayu Jambi sesuai tingkatannya mempunyai fungsi :

- a. membantu pemerintah dalam melaksanakan dan memelihara hasil pembangunan pada segala bidang, terutama pada bidang sosial kemasyarakatan dan sosial budaya;
- b. memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat pada setiap tingkat Lembaga Adat Melayu Jambi berkenaan dengan perselisihan dan perkara adat;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat Melayu Jambi dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah pada khususnya dan kebudayaan nasional pada umumnya.
- d. menjaga, memelihara dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat Melayu Jambi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Jenis-jenis sastra adat Jambi cukup beragam seperti adanya drama Dul Muluk, sya'ir dan sebagainya. Tetapi yang paling populer di antaranya adalah (1) petatah-petitih, (2) seloko, dan (3) pantun. Yang Pertama, Petatah-petitih, merupakan sastra adat Jambi yang berisikan nasehat dan pandangan-pandangan serta pedoman hidup yang baik, petunjuk dalam melakukan hubungan sosial kemasyarakatan. Melalui petatah-petitih ini, orang bijak atau biasa disebut tuo-tuo, nenek mamak, tuo tengganai, alim ulama dan cerdik pandai mengingatkan agar setiap persoalan yang dihadapi oleh anak kemenakan supaya diselesaikan dengan sebaik-baiknya, supaya tidak ada akibat negatif di kemudian hari.

Sastra adat yang diambil di dalam penelitian ini adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam seloko adat Jambi, ada beberapa seloko adat diantaranya adalah:

Anak bujang sulung menggerah, tapeso sekali belum maknanya Budaya Melayu, termasuk Melayu - Jambi, banyak dicoraki oleh ajaran - ajaran agama Islam. Demikian

kentalnya Islam mewarnai budaya Melayu sehingga Melayu sering diidentikkan dengan Islam. Itu tercermin dari ungkapan yang berbunyi “Orang Melayu adalah orang yang beragama Islam, berbahasa Melayu, dan beradat-istiadat Melayu”. Ungkapan “Anak bujang sulung menggerah, tapeso sekali belum” juga ada kaitannya dengan pengaruh Islam karena ungkapan tersebut berarti akil baligh, yaitu suatu masa dimana seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, sudah diwajibkan untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam. Meskipun demikian, bukan berarti yang bersangkutan telah menjadi dewasa. Nilai yang terkandung dalam ungkapan itu, dengan demikian, adalah kewajiban. Dalam hal ini adalah kewajiban untuk menjalankan ajaran-ajaran agama Islam.

Anak idak lagi sekato bapaknyo, penakan idak lagi sekato pemamaknyo maknanya dalam keluarga Melayu, termasuk Melayu-Jambi, ketika anak masih kecil (belum dewasa atau menikah) adalah menjadi tanggungjawab orang tuanya dan atau kerabatnya. Akan tetapi, ketika ia telah dewasa dan atau menikah, tidak lagi menjadi tanggungjawab orang dan atau kerabatnya. Dan, jika itu terjadi, maka keadaan seperti itu diungkapkan sebagai “Anak idak lagi sekato bapaknyo, penakan idak lagi sekato pemamaknyo” Nilai yang terkandung dalam ungkapan ini, dengan demikian, adalah kemandirian.

Bak dalam dengan ketitir, angguk seangguk segayo tidak artinya Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam bermasyarakat. Jika dalam suatu perbincangan terdapat orang berbeda pendapat, maka orang yang bersangkutan disebut sebagai “bak dalam dengan ketitir, angguk seangguk segayo tidak”. Nilai yang terkandung dalam ungkapan, dengan demikian, adalah keberagaman.

Bakilek ikan dalam aek tentu jantan betino Artinya manusia adalah makhluk sosial. Artinya, seseorang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia harus tolong-menolong. Tolong-menolong yang saling menguntungkan oleh masyarakat Melayu-Jambi diungkapkan sebagai bakilek ikan dalam aek tentu jantan betino. Nilai yang terkandung dalam ungkapan ini adalah tolong-menolong.

Bersambung orang nak panjang artinya manusia di dalam kehidupannya, terutama dalam memenuhi kebutuhannya, tidak mungkin dilakukan sendiri, tanpa membutuhkan atau kerjasama dengan orang lain. Oleh karena itu, disamping disebut sebagai makhluk yang berbudaya, sekaligus sebagai makhluk sosial. Berhubungan dengan orang lain yang saling menguntungkan oleh masyarakat Melayu-Jambi diungkapkan sebagai bersambung orang nak panjang. Nilai yang terkandung dalam ungkapan ini, dengan demikian, adalah kerjasama.

Bulat aek dek pembuluh, bulat kato dek mufakat artinya dalam suatu pertemuan atau musyawarah bisa saja terjadi perbedaan pendapat atau sependapat. Jika dalam musyawarah tersebut terjadi kesepakatan untuk mufakat, maka oleh masyarakat Melayu-Jambi diungkapkan sebagai bulat aek dek pembuluh, bulat kato dek mufakat. Nilai yang terkandung dalam ungkapan tersebut adalah kemufakatan.

Dilarik dijajo artinya Apa yang menjadi milik, baik seseorang maupun kelompok, mestinya harus diperlakukan sebagaimana mestinya (dijaga dan ditertibkan). Hal yang demikian, oleh masyarakat Melayu-Jambi, diungkapkan sebagai dilarik dijajo. Nilai yang terkandung dalam ungkapan ini adalah ketertiban.

Ilok arak dek seiring, ilok kato dek mufakat artinya dalam suatu masyarakat sering terjadi permasalahan. Jika permasalahan itu dipecahkan secara bersama sehingga menghasilkan suatu kesepakatan, maka oleh masyarakat Melayu-Jambi disebut sebagai ilok arak dek seiring, ilok kato dek mufakat. Nilai yang terkandung dalam ungkapan ini adalah kemufakatan. Dan masih banyak contoh nilai-nilai adat istiadat lainnya yang dapat diimplementasikan di lingkungan pemerintahan. Dan lain-lain

Prinsip good governance :

Menurut lembaga administrasi Negara (LAN) ada Sembilan aspek fundamental sebagai prinsip good governance yaitu:

1. Partisipasi (participation)
2. Penegakan hukum (rule of law)
3. Transparansi (transparency)
4. Responsif (responsiveness)
5. Orientasi kesepakatan (consensus orientation)
6. Keadilan (equality)
7. Efektifitas (effectiveness) dan efisien (efficiency)
8. Akuntabilitas (accountability).

Sedangkan menurut United Nations Development Programme (UNDP) menyatakan bahwa good governance adalah : 1. Partisipasi, 2. Transparansi, 3. Efektif dan efisien, 4. Akuntabel, 5. Kepastian hukum, 6. Responsif, 7. Konsensus, 8. Setara dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Menurut Bogdan yang dikutip Mukhtar bahwa penelitian kualitatif lapangan adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (observasi). Menurut Kirk dan Mileer, masih dikutip Mukhtar bahwa penelitian kualitatif lapangan lebih menekankan keakuratan datanya pada keterlibatan peneliti (partisipan observation). Menurut John "The characteristic of qualitative research is: firstly, exploring a problem and developing a detailed understanding of a central phenomenon, secondly having the literature review play a minor role but justify the problem, thirdly stating the purpose and research questions in a general and broad way so as to the participants' experiences, fourthly collecting data based on words from a small number of individuals so that the participants' views are obtained, fifthly analyzing the data for description and themes using text analysis and interpreting the larger meaning of the findings, sixthly writing the report using flexible, emerging structures and evaluative criteria, and including the researchers' subjective reflexivity".

A. Situasi sosial dan subjek penelitian

a. Situasi sosial

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, maka Spradley dinamakan social situation atau situasi social yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara energis. Situasi social tersebut bias

terdapat dirumah juga keluarga dan aktivitasnya, atau orang-orang yang sedang berinteraksi satu sama lain atau juga ditempat kerja, dikota, di desa, disekolah, atau wilayah suatu Negara. Situasi-situasi tersebut dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin difahami secara lebih mendalam apa yang terjadi didalamnya. Pada situasi social atau obyek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (activity) orang-orang (actor) yang ada pada tempat (place) tertentu. Dengan demikian peneliti bisa bertindak sebagai pengawas diluar lapangan, melakukan pengamatan terhadap situasi social subjek penelitian.

b. Subjek penelitian

Sample dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana memilih informan atau situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi yang mantap dan terpercaya mengenai elemen-elemen yang ada.

Subjek penelitian di dalam penelitian ini merupakan hal yang berhubungan dengan penerapan nilai-nilai adat di lingkungan pemerintah kota jambi.

B. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

1) Data primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari peneliti kepada sumbernya, tanpa adanya perantara, sumber yang dimaksud dapat berupa benda-benda, situs atau manusia. Teknik pengumpulan data dalam konteks data primer ini tergantung jenis data yang diperlukan, jika yang diperlukan adalah data tentang manusia, maka peneliti dapat memperolehnya dengan menyiapkan seperangkat alat instrument atau melakukan observasi langsung terhadap subjek atau setting yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi data-data yang diinginkan, peneliti dalam hal ini menerapkan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Nasution mengatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.

2. Metode Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Menurut Suharsimi Arikunto wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan analisis interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman analisis tersebut terdiri dari tiga kegiatan yang saling berinteraksi yaitu:

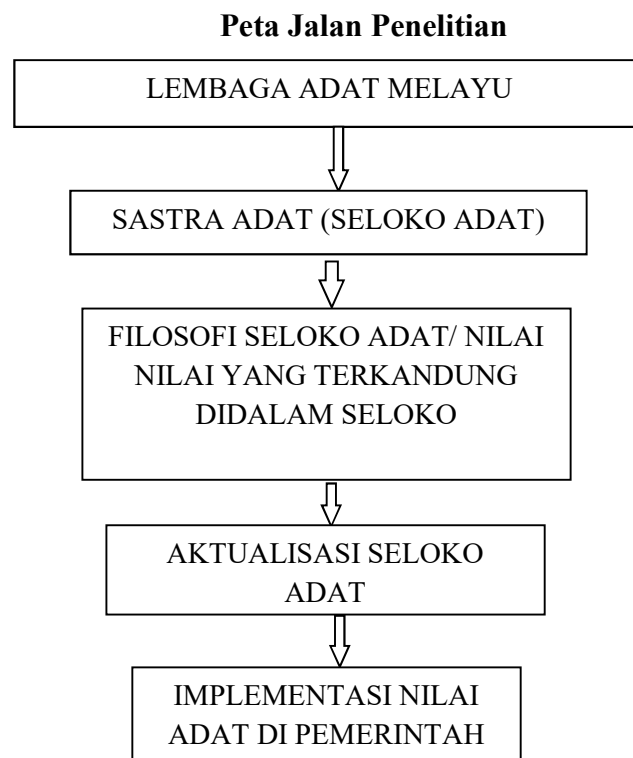
1. Reduksi Data

Hasil pengamatan dan wawancara yang ditemukan data yang sedemikian banyak dan kompleks serta campur aduk, maka langkah yang perlu diambil adalah mereduksi data. Reduksi data adalah aktifitas peneliti dalam memilih dan memilah data yang dianggap relevan untuk disajikan. Menurut Miles dan Huberman, data reduction refer to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting and transforming the “row” data that appear in written up fieldnot.

2. Penyajian data

Penyajian data disajikan secara sistematis, agar lebih mudah difahami tentang hubungan antar bagian yang mempengaruhi proses pengelolaan pelayanan. Menurut Miles dan Huberman, we define a display as an organized assembly of information that permits conduction drawing and action tacking.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema dibawah ini:



3. Verifikasi/penarikan kesimpulan

Langkah ketiga ddalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak.

E. Uji Keterpercayaan Data (Trustworthines)

Pemeriksaan keabsahan data merupakan fokus yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif. Untuk mendapat kepercayaan data, maka dilakukan teknik perpanjangan keikutsertaan, kecerminan pengamat dan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jelaskan

Pentingnya peran adat melayu di tanah pilih pusako betuah

Kota Jambi merupakan pusat dan ibukota dari provinsi Jambi. Dengan demikian, kota Jambi dalam konteks daerah adalah etalase bagi daerah-daerah lain dalam provinsi Jambi, baik dalam tata pembangunan fisik maupun non fisik. Dalam menjalankan perannya tersebut, pemerintah kota Jambi merasa perlu terus berbenah mengenyot berbagai pembangunan yang selaras dengan zaman namun tetap berpegang dengan nilai-nilai kearifan local, yang sejak turun temurun telah mengakar dan diamalkan di bumi bertuah kota Jambi ini.

Asumsi itu setidaknya bisa didasarkan pada komitmen yang tertuang di dalam Visi dan Misi pemerintah kota Jambi, yang ingin mewujudkan kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa yang bersandar pada akhlak dan nilai-nilai budaya yang ada di kota Jambi.

Dalam menjadikan nilai kearifan local sebagai landasan pembangunan daerah, tidak cukup hanya dengan mensosialisasikan kepada aparatur pemerintahan dan masyarakat, tapi juga harus menjadi karakter dan pola pikir, pemerintah dan masyarakat kota Jambi. Nilai-nilai tersebut harus mampu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, karena nilai-nilai budaya yang berusaha dipertahankan masyarakat pada akhirnya akan menjadi sebuah tradisi sekaligus merupakan identitas bagi masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu prinsip yang harus dipenuhi dalam pembangunan di era otonomi daerah adalah pembangunan harus sesuai dengan kondisi sosial kultural masyarakatnya. Perlu dipahami bahwa pembangunan berbasis kearifan lokal bukan hanya terletak pada pembangunan infrastruktur yang dihiasi oleh ukiran-ukiran yang menggambarkan kemelayuan, atau membuat tugu-tugu yang bersimbol benda-benda bersejarah, dan para pegawai pemerintah yang berpakaian baju melayu dan tanjak, akan tetapi justru perilaku masyarakat lah yang seharusnya dibentuk agar sesuai dengan karakter orang Melayu Jambi yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Nilai-nilai yang mengajarkan pribadi yang ramah, tidak arogan, jujur, religious, dan bersahaja.

Kearifan local dalam konteks penelitian ini adalah nilai-nilai adat Melayu Jambi merupakan kekayaan intelektual karena merupakan buah pemikiran leluhur bangsa yang harus dilestarikan. Sekalipun demikian, nilai adat Melayu Jambi yang harus menjiwai para pemangku kebijakan di kota Jambi ini, harus tetap sesuai dengan tantangan dan kemajuan zaman, jangan sampai kita mempertahankan tradisi atau mengamalkan nilai-nilai tradisi lantas menutup diri dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai-nilai dari kearifan lokal harus tetap hidup dan berkembang selaras dengan nilai-nilai modern, dan sekaligus sebagai upaya memproteksi nilai-nilai adat Melayu Jambi dari pengaruh globalisasi ini.

Terdapat sejumlah aspek yang dijalankan dalam melaksanakan pembangunan berbasis kearifan local atau nilai-nilai adat Melayu Jambi dan keterkaitannya dengan upaya menciptakan tata kelola pemerintah kota Jambi yang baik, yakni adanya prinsip keterbukaan dan transparansi antar pemerintah dan masyarakat, mengimplementasikan prinsip yang terdapat dalam adat Melayu Jambi, mengkolaborasikan semangat persatuan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota Jambi dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong yang terdapat di dalam nilai-nilai adat Melayu Jambi.

Dalam setiap pembangunan, baik fisik maupun non fisik, perlu memperhatikan berbagai aspek dan semangat yang mendasarinya. Pembangunan yang tidak berorientasi pada kebaikan masyarakat, dan atau tidak menimbang pada kekhasan serta ‘selera’ masyarakat setempat, akan lebih cenderung mengundang ketidakpuasan masyarakat sebagai ‘penikmat’ pembangunan itu. Oleh karena itu, menjadikan nilai-nilai adat sebagai landasan sikap dalam mengelola pemerintahan kota Jambi adalah pilihan yang bijak. Bila diperhatikan, segala nilai-nilai yang terkandung di dalam adat Melayu Jambi, sudah sesuai dengan agama Islam yang merupakan agama mayoritas masyarakat kota Jambi.

Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public di kota Jambi, terutama dalam rentang waktu kepemimpinan Dr. H. Syarif Fhasa dan H. Abdullah Sani (2013-2018), memang cukup dirasakan oleh masyarakat kota Jambi. Prmbangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan lain sebagainya, hanpir merata dilakukan. Begitu juga inovasi dalam meningkatkan pelayanan public yang prima berbasis IT juga mulai terlihat dan terintegrasi, meski belum maksimal.

Salah satu program pembangunan yang penting periode pemerintahan ini adalah Bangkit Berdaya. Menurut penjelasan dari pihak Bappeda kota Jambi, Penyelenggaraan Program BANGKIT BERDAYA dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan material/bahan bangunan kepada kelompok RT yang telah memiliki rencana penggunaan bantuan dan wilayah kerja yang terdokumentasi dengan baik.

Masih menurut sumber yang sama, program Bangkit Berdaya ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan saran prasarana dan utilitas lingkungan rukun tetangga (RT) dalam wilayah Kota Jambi; dan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan.

Sasaran bantuan material/bahan bangunan adalah kelompok rukun tetangga dalam wilayah kota Jambi yang telah mengusulkan rencana penggunaan bantuan material/bahan bangunan dimaksud dan telah terkompilasi dalam data pokok hasil usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Jambi, dan telah diverifikasi ulang oleh

Camat pada masing-masing wilayah Kecamatan, serta secara khusus telah mengajukan dokumen usulan kepada Camat melalui Lurah pada masing-masing wilayah Kecamatan.

Dalam menjalankan program ini, pemerintah kota Jambi menerapkan beberapa prinsip. (i) Keadilan; Menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban (ii) Kemanfaatan; Dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti. (iii) Keterpaduan: Mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis (iv) Kemitraan ; Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dibutuhkan kemitraan dengan berbagai pihak (v) Keterbukaan ; Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan ini berhak mendapatkan informasi yang benar dan bersedia menerima masukan bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan (vi) Akuntabilitas ; Berbagai sumber daya yang digunakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif (vii) Partisipasi ; Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan unsur masyarakat termasuk dunia usaha dengan mendayagunakan berbagai sumber daya yang dimiliki (viii) Keberlanjutan ; Dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian. Dilihat dari filosofi, dasar pelaksanaan, semangat dan prinsipnya, kegiatan Bangkit Berdaya ini, selain mengandung prinsip-prinsip Good Governance, juga sangat sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam adat Melayu Jambi, seperti nilai gotong royong dan musyawarah mufakat. Dimana keduanya merupakan nilai-nilai adat yang penting untuk diterapkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kegiatan ini diawali dengan adanya usulan pembangunan melalui kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kota Jambi. Semua jajaran yang terkait dilibatkan, dari jajaran pemerintah kota hingga jajaran RT dan masyarakat umum dapat memberikan masukan dalam kegiatan ini. Semangat musyawarah mufakat dalam musrenbang ini, merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam adat Melayu Jambi. Seperti pada seloko : **Ilok arak dek seiring, ilok kato dek mufakat** artinya dalam suatu masyarakat sering terjadi permasalahan. Jika permasalahan itu dipecahkan secara bersama sehingga menghasilkan suatu kesepakatan.

Begitu juga dengan seloka yang lain: **Bulat aek dek pembuluh, bulat kato dek mufakat** artinya dalam suatu pertemuan atau musyawarah bisa saja terjadi perbedaan pendapat atau sependapat. Jika dalam musyawarah tersebut terjadi kesepakatan untuk mufakat.

Dari sisi pelaksanaan program Bangkit Berdaya ini pula, semangat gotong royong yang dibuktikan dengan tingginya kesadaran partisipasi masyarakat dalam pembangunan, merupakan cermin dari sikap kebersamaan, baik dalam suka maupun duka yang juga dijunjung tinggi oleh masyarakat Melayu Jambi. Terdapat seloka adat menjelaskan semangat ini: Hati Tungau Samo di cacah, Hati Gajah samo dilapah. Ungkapan ini bermaksud tentang pentingnya partisipasi dan keterbukaan (Akuntabilitas) dalam suatu masyarakat. Tidak membedakan kelompok atau golongan dalam merasakan kue pembangunan, baik dalam skala besar maupun yang kecil, asal itu dilaksanakan dengan asas keadilan dan keterbukaan.

Selain itu, program Bangkit Berdaya ini juga memperlihatkan bahwa sebagai makhluk sosial, baik itu dikalangan aparatur pemerintahan maupun masyarakat, menyadari untuk bisa membangun kota Jambi ini, perlu sinergitas antara keduanya. Sebuah seloka adat lagi

menyebutkan tentang pentingnya sinergitas itu dalam pembangunan: **Bersambung orang nak panjang artinya** manusia di dalam kehidupannya, terutama dalam memenuhi kebutuhannya, tidak mungkin dilakukan sendiri, tanpa membutuhkan atau kerjasama dengan orang lain. Dalam seloka lain juga disebutkan: **Bakilek ikan dalam aek tentu jantan betino** Artinya manusia adalah makhluk sosial. Artinya, seseorang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia harus tolong-menolong.

Aspek lain yang bisa dilihat dalam program unggulan pemerintah kota Jambi tersebut adalah kemandirian. Masyarakat diajar untuk tidak hanya bergantung dengan pemerintah, tapi juga diminta untuk bersikap mandiri, khususnya dalam hal-hal yang memang bisa dilakukan sendiri oleh masyarakat. Pemerintah menyediakan materil, masyarakat menyumbangkan fikiran dan tenaganya. Hal ini sesuai dengan nilai adat yang menekankan akan pentingnya sikap mandiri dan berdikari. Seperti kata seloka adat: **Anak idak lagi sekato bapaknyo, penakan idak lagi sekato pemamaknyo** maknanya dalam keluarga Melayu, termasuk Melayu-Jambi, ketika anak masih kecil (belum dewasa atau menikah) adalah menjadi tanggungjawab orang tuanya dan atau kerabatnya. Akan tetapi, ketika ia telah dewasa dan atau menikah, tidak lagi menjadi tanggungjawab orang dan atau kerabatnya.

Begitu juga dengan aspek memupuk keberagaman. Masyarakat kota Jambi yang majemuk ini, terdiri dari berbagai suku dan agama, maka orientasi pembangunan haruslah yang tidak bisa mengganggu keharmonisan masyarakat. Perbedaan pendapat dalam pemerintah dan masyarakat adalah suatu hal yang wajar, selama itu untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Dengan program ini, dengan sendirinya masyarakat dapat menghadirkan semangat kebersamaan diatas sikap mementingkan pribadi dan kelompok. Sebuah seloka adat tentang ini berbunyi: **Bak dalam dengan ketitir, angguk seangguk segayo tidak** artinya Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam bermasyarakat. Jika dalam suatu perbincangan terdapat orang berbeda pendapat, maka orang yang bersangkutan disebut sebagai “bak dalam dengan ketitir, angguk seangguk segayo tidak”. Nilai yang terkandung dalam ungkapan, dengan demikian, adalah keberagaman.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Hasil dari paparan diatas dapatlah disimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai adat melayu Jambi dalam mewujudkan good governance di lingkungan pemerintah kota Jambi sudah dilakukan dengan baik, ini dibuktikan dengan program bangkit berdaya dimana program tersebut mengandung nilai-nilai gotong royong melalui cara pemerintah memberikan fasilitas material untuk membangun lingkungan-lingkungan, tetapi masyarakatlah yang bersama-sama mengerjakan dan menyelesaikan pembangunan di lingkungan tersebut misalnya pembangunan jalan di lorong-lorong, pembangunan jembatan kecil dll. Nilai adat yang lain yang terdapat didalam program pemerintah kota Jambi adalah nilai kemandirian, dimana masyarakat tidak berpangku tangan menunggu hasil pembangunan dari pemerintah tetapi mau meluangkan waktu untuk sama-sama membangun desa dan lingkungan mereka, satu lagi penerapan nilai adat yang diterapkan di lingkungan pemerintah kota Jambi adalah nilai

musyawarah. Nilai ini dapat dilihat aktualisasinya dalam kegiatan musrembang yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Tasman, 2016, Menelusuri Jejak Kerajaan Melayu Jambi dan Perkembangannya, (Jambi: FIB Press).
- Ayub Mursalin, “Sejarah dan Struktur Undang-undang Kesultanan Jambi”, dalam Jurnal Budaya “Seloko” Vol. 1, No. 2 tahun 2012
- Creswell, Jhon W. 2012, Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative research. (T.p).
- Hasan Ubaidillah, 2004, Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju)
- Ied al-Munir, Etika Pemimpin dalam Adat Melayu Jambi, dalam Jurnal Konstektualita, Vol. 28, no 2, 2013.
- Komarudin Hidayat., 2006, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah).
- Lembaga Adat Provinsi Jambi, 2003, Pokok-Pokok Adat, Hukum Adat Jambi, (Jambi: tp)
- Locher-Scholten Elsbeth, 2008, Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda, terj. Noor Cholis, (Jakarta: Banana dan KITLV)
- L.W.C van den Berg, 1894, “Oendang-Oendang Djambi” dalam Rechtsbonnen van Zuid-Sumatra, (Leiden: Martinus Nijhoff.)
- Mukhtar, 2010, Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah, (Jambi: Sulthan Thaha Press).
- Saidina Usman Quraisy, 2011, Good Governance dalam Perspektif NU dan Muhammadiyah, (Jambi: Syariah Press).
- Samudra Wibawa, 2008, Good Governance dan Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Sopian Effendi, 2010, Reformasi Tata Pemerintahan: Menyiapkan Aparatur Negara Mendukung Demokratisasi Politik dan Ekonomi Terbuka, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Sugiono, 2007, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta),
- Sugiono, 2014, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Alfabeta).